

# BAB VI

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

VISI: “LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019 ”			
Misi I : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah	1.1 Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung;	1.1.1 Revitalisasi dan Percepatan Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, serta Kehutanan	<p>a Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan bermutu melalui ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi berbasis pada IPTEK dan sumber daya lokal (kawasan)</p> <p>b Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya dan tangkap</p> <p>c Pengembangan produksi dan produktivitas hasil hutan untuk memenuhi ketersediaan pangan dan bahan baku industri dalam negeri</p>
	1.2 Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan protein;	1.2.1 Mengembangkan Panganekarangaman Pangan, Keamanan Pangan dan Ketersediaan Cadangan Pangan dan Akses Pangan serta Distribusi Pangan	a Meningkatkan keanekaragaman konsumsi dan kualitas pangan, serta menurunnya ketergantungan terhadap pangan pokok beras, ketersediaan dan konsumsi sepanjang tahun sampai tingkat rumah tangga serta kualitas dan pengendalian keamanan pangan
	1.3 Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung;	1.3.1 Peningkatan daya saing industri unggulan berbasis potensi lokal daerah	<p>a Meningkatkan unit usaha industri kecil menengah, penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah, serta kemitraan antar industri</p> <p>b Meningkatkan pelayanan terhadap pelaku usaha IKM serta mendorong tumbuhnya industri-industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi)</p> <p>c Meningkatkan sinergitas pengembangan industri, penguasaan teknologi industri terutama industri pengolahan hasil pertanian/perkebunan, produk pertanian/perkebunan, industri makanan dan minuman serta penyerapan tenaga kerja oleh industri besar</p> <p>d Meningkatkan mutu kemasan pangan dan merek dalam rangka peningkatan daya saing bagi IKM</p> <p>e Meningkatkan mutu hasil dan menengah yang berbasis ekspor dalam rangka peningkatan daya saing era globalisasi</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.4	Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sub sektor perdagangan pada PDRB Provinsi Lampung ;	1.4.1 Peningkatan daya daing perdagangan barang dan jasa	<p>a Pengembangan sistem jaringan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya secara efektif dan efisien</p> <p>b Meningkatkan volume ekspor komoditi unggulan</p> <p>c Meningkatkan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap konsumen dan produsen</p>
1.5	Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah	1.5.1 Penumbuhan dan Perkuatan Koperasi dan UMKM	<p>a Memfasilitasi penumbuhan wirausaha baru dan berdaya saing, serta pengembangan inkubator bisnis dan UMKM yang dilaksanakan bersama seluruh stakeholders, termasuk perguruan tinggi dan pelaku bisnis</p> <p>b Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, akses teknologi tepat guna, akses pasar melalui promosi dan kreasi produk UMKM serta dukungan pendampingan tempat usaha dan permodalan bagi UMKM dengan jaminan kolateral bekerjasama kolateral perbankan dan lembaga keuangan mikro</p>
1.6	Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah;	1.6.1 Peningkatan daya saing investasi daerah	<p>a Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru</p>
1.7	Berkembangnya kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah	1.7.1 Mengembangkan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Lampung yang berakar pada alam dan budaya dalam konteks destinasi wisata kultural;	<p>a Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan ekonomi masyarakat</p>
1.8	Peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD);	1.8.1 Intensifikasi, optimalisasi, dan efisiensi pengelolaan PAD yang menjadi kewenangan provinsi	<p>a Pemanfaatan TIK dalam pelayanan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi II : Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Sosial</b>			
1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas dasar wilayah	<p>1.1 Tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegrasi dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang</p> <p>1.2 Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota</p> <p>1.3 Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang</p> <p>1.4 Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah);</p> <p>1.5 Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung;</p>	<p>1.1.1 Pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan</p> <p>1.1.2 Pengembangan jaringan transportasi antar moda dengan meningkatkan keterpaduan jaringan transportasi nasional, provinsi, kabupaten/kota dan pedesaan sebagai penghubung antar pusat produksi dan pasar</p> <p>1.2.1 Pelaksanaan penataan ruang sesuai dengan indikasi program prioritas RTRW Provinsi Lampung</p> <p>1.3.1 Peningkatan kualitas tata kelola sumber daya air sesuai dengan pola pengelolaan sumber daya air</p> <p>1.4.1 Pengembangan prasarana dan sarana bangunan, Gedung dan lingkungan</p> <p>1.5.1 Peningkatan kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi tenaga listrik</p>	<p>a Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan diselenggarakan dengan jalan dan jembatan nasional serta jalan dan jembatan kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan konektivitas antar bagian wilayah dalam provinsi untuk mendukung sistem logistik nasional</p> <p>a Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan (darat, laut, dan udara) dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa</p> <p>a Pengembangan kawasan-kawasan strategis, cepat tumbuh, kawasan andalan, dan kawasan ekonomi khusus berdasarkan peruntukan masing-masing kawasan mengacu pada RTRW dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah terkait lainnya</p> <p>a Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;</p> <p>a Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk menciptakan hunian yang layak, aman, sehat, nyaman, dan produktif</p> <p>b Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman perdesaan</p> <p>c Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Provinsi.</p> <p>a Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan</p> <p>b Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi pemakaian energi fosil</p>

Misi III : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Iptek dan Inovasi, Budaya Masyarakat, dan Toleransi Beragama				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan indeks pembangunan pendidikan masyarakat yang cukup tinggi yang berkualitas;	1.1 Menurunnya angka melek huruf;	1.1.1 Perluasan Pendidikan Non Formal,	a Menuntaskan Lampung bebas buta aksara melalui perluasan pendidikan formal;	
	1.2 Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun ;	1.2.1 Penyelenggaraan pendidikan dasar dengan bebas biaya;	b Meningkatkan gerakan tingkat provinsi untuk membuka seluas-luasnya paket A, Paket B dan Paket C dengan paradigma mengedepankan aktivitas proses belajar mengajar, termasuk pembukaan SMP terbuka, SMA terbuka secara meluas di berbagai kabupaten di Provinsi Lampung;	
	1.3 Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat dengan meningkatkan APM dan APK Perguruan Tinggi	1.3.1	1.3.1 Pencanaan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah;	a Mengembangkan program pendidikan 12 tahun;
		1.3.2	1.3.2 Meningkatkan kualifikasi dan sertifikasi bagi pendidik.	b Mengembangkan dan meningkatkan model pendidikan kejuruan yang merespon kebutuhan dunia usaha
	1.3.3	1.3.3 Redistribusi tenaga pendidik kesemua wilayah kabupaten/kota	c Memfasilitasi pengembangan akademi komunitas di kabupaten/kota Provinsi Lampung	c Memfasilitasi pengembangan akademi komunitas di kabupaten/kota Provinsi Lampung
1.3.4	1.3.4 Perkuatan dan peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan serta pemutakhiran teknologi pembelajaran	d Memperkuat manajemen atau tata pamong sekolah ( <i>good school governance</i> )	d Memperkuat manajemen atau tata pamong sekolah ( <i>good school governance</i> )	
		1.3.5 Penyelenggaraan pendidikan berkarakter, partisipatif dan berbasis budaya	a Meningkatkan kompetensi tenaga pendidikan dan manajemen kependidikan;	
			a Melakukan pemerataan secara proposional tenaga pendidik diseluruh kabupaten/kota	
			a Meningkatkan kualitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan updating teknologi pembelajaran	
			a Menyelenggaraan pendidikan berkarakter melalui pengembangan pendidikan partisipatif dan berbasis budaya lokal dan nasional	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>2 Meningkatkan indeks pembangunan dan derajat kesehatan masyarakat yang cukup tinggi</p>	<p>2.1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak dengan menurunkan AKB dari 7,11/1000 KH tahun 2012 menjadi 6,6/1000 KH tahun 2019</p>	<p>1.3.6 Mengembangkan perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling</p> <p>2.1.1 Peningkatan rasio ketersediaan sarana kesehatan terhadap satuan penduduk</p>	<p>a Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat khususnya pada usia sekolah</p> <p>a Menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan;</p> <p>b Meningkatkan kualitas pola hidup bersih dan sehat serta makanan yang bergizi;</p> <p>c Meningkatkan Kualifikasi Rumah Sakit Provinsi menjadi Rujukan dan Puskesmas sesuai standar medik</p> <p>d Meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar nasional;</p> <p>f Menjamin tersedianya tenaga kesehatan yang merata dan berkualitas;</p> <p>g Mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan masyarakat;</p> <p>h Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular;</p>
<p>3 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya</p>	<p>3.1 Terinternalisasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal</p>	<p>3.1.1 Mengembangkan Nilai dan keragaman Budaya Lokal</p>	<p>a Meningkatkan pembinaan budaya Lampung dan budaya multikultur lainnya melalui peningkatan dan fasilitas akulturasi budaya nusantara dan budaya Lampung;</p> <p>b Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan Provinsi Lampung</p>
<p>4 Terwujudnya kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat</p>	<p>4.1 Meningkatnya pelayanan sosial dan penanggulangan korban bencana;</p>	<p>4.1.1 Memberikan pelayanan, perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya</p> <p>4.1.2 Memperkuat fungsi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</p>	<p>a Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial;</p> <p>b Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial</p> <p>c Menyantuni PKRI/Janda PKRI dan Keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, dan kesetiakawanan sosial.</p> <p>a Penyelenggaraan fungsi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
5	Mewujudkan kompetensi dan produktivitas kerja	<p>4.1.3 Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kemitraan dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan dunia usaha.</p> <p>5.1.1 Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan;</p>	<p>a Penyelenggaraan kemitraan dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan dunia usaha.</p> <p>a Meningkatkan daya saing tenaga kerja</p> <p>b Meningkatkan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan, serta Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri sehingga mereka terhindar dari perlakuan yang merugikan</p> <p>c Memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan upah minimum regional (UMR).</p>
6	Mewujudkan pengembangan kawasan transmigrasi	<p>6.1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkembangnya kawasan transmigrasi</p>	<p>a Mengembangkan pusat layanan informasi ketransmigrasian</p> <p>b Mewujudkan kawasan transmigrasi</p>
7	Mewujudkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga	<p>7.1 Meningkatkan indeks pembangunan dan kesetaraan gender;</p> <p>7.2 Meningkatkan kesejahteraan keluarga</p> <p>7.3 Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat;</p>	<p>a Menerapkan anggaran responsif gender (ARG)</p> <p>b Meningkatkan perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak.</p> <p>a Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga</p> <p>a Mewujudkan pemuda Lampung yang memiliki semangat dan idealisme kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan;</p> <p>b Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui olahraga.</p> <p>a Terbinanya dan berkembangnya prestasi atlet</p> <p>b Meningkatkan kapasitas kelembagaan KONI</p> <p>c Terbangunnya dan terperiharanya sarana dan prasarana olahraga</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
8 Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat dan keagamaan yang toleran	8.1 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama;	7.3.3 Perkuatan pembinaan pramuka, serta pengembangan sarana dan prasarana pramuka	a Terbinanya organisasi dan anggota pramuka b Terbangunnya sarana dan prasarana pembinaan pramuka
9 Meningkatkan kapasitas dan kinerja SDM, sehingga mampu menjadi pelaku difusi dan inovasi teknologi	9.1 Mengembangkan jaringan kelembagaan dan peneliti;	8.1.1 Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat 9.1.1 Meningkatkan kemampuan SDM	a Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama; b Mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan; a Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang daerah;
10 Meningkatkan jalinan kerjasama dan hubungan sinergitas antar lembaga iptek di daerah	10.1 Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek untuk menghasilkan produk litbang yang berdaya guna bagi daerah;	10.1.1 Meningkatkan sinergitas antar lembaga iptek di daerah	a Mengembangkan jaringan kelembagaan dan peneliti;
<b>Misi IV :Meningkatkan Pelestarian SDA Dan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan</b>			
1 Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan	1.1 Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, serta perlindungan dan konservasi SDA  1.2 Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1.1.1 Pengendalian pencemaran air, udara dan tanah  1.2.1 Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 1.2.2 Pemulihan dan konservasi Sumber Daya Air, udara, lahan 1.2.3 Pengawasan tingkat keataatan hukum Lingkungan Hidup	a Penyusunan perencanaan dan kebijakan lingkungan hidup  a Peningkatan pengendalian kualitas air, udara dan tanah a Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat a Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>1.2.4 Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis partisipatif</p> <p>1.2.5 Perencanaan dan kebijakan pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>1.3.1 Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar/dalam kawasan hutan dalam percepatan rehabilitasi hutan dan lahan serta mendukung pengamanan dan perlindungan hutan</p> <p>1.3 Peningkatan manfaat kawasan hutan produksi Lampung dan aspek ekonomis dan ekologis</p>	<p>a Peningkatan upaya penegakkan hukum Lingkungan Hidup</p> <p>a Peningkatan kapasitas SDM dan institusi lembaga Lingkungan Hidup</p> <p>b Pengembagan sumber-sumber alternatif pendanaan lingkungan</p> <p>c Pengembangan inovasi bidang Lingkungan Hidup</p> <p>a Mempertahankan kawasan hutan seluas 30% dari luas Provinsi Lampung</p> <p>b Meningkatkan pengamanan, perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutandalam rangka mewujudkan Provinsi yang hijau (<i>Green Province</i>) didukung upaya menciptakan Provinsi yang bersih (<i>clean province</i>)</p>
<b>Misi V : Mendukung Supremasi Hukum, Membangun Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Memantapkan Pemerintahan Yang Baik dan Antisipatif</b>			
1 Mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum	1.1 Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat	<p>1.1.1 Pengembangan struktur hukum masyarakat</p> <p>1.1.2 Pengembangan substansi hukum dalam upaya rekayasa sosial, dan <i>control /social</i></p> <p>1.1.3 Pengembangan budaya hukum masyarakat</p> <p>1.1.4 Memberikan dukungan dan fasilitasi penegakan hukum</p>	<p>a Mengembangkan kelembagaan/pranata hukum di masyarakat</p> <p>a Meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi antara produk hukum daerah dan pusat, dan antar produk hukum daerah</p> <p>b Membuat produk hukum yang memberikan kepastian, dan berkeadilan bagi masyarakat dan dunia usaha</p> <p>a Meningkatkan Pendidikan hukum masyarakat</p> <p>b Meningkatkan kemitraan dengan aparat penegak hukum</p> <p>a Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat</p> <p>b Memberikan aksesibilitas penegakan hukum di daerah</p> <p>c Mewujudkan tertib administrasi pertanian;</p> <p>d Menyelesaikan masalah konflik pertanian</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>2 Mengembangkan pemerintahan yang baik dan antipatif</p>	<p>2.1 Meningkatkan kinerja pemerintahan ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik melalui pelayanan prima</p> <p>2.2 Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik</p> <p>2.3 Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN</p>	<p>2.1.1 Penataan fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar lebih memadai, ramping, luwes dan responsif;</p> <p>2.2.1 Mengembangkan reformasi birokrasi dalam kerangka good governance</p> <p>2.3.1 Mengembangkan reformasi birokrasi dalam kerangka <i>clean government</i></p>	<p>a Menyelenggarakan pemerintahan yang diarahkan oleh Visi, Misi</p> <p>b Menyelenggarakan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi, data, dan antipatif</p> <p>c Mengelola pelaksanaan pembangunan yang dikendalikan oleh aturan-aturan yang mengikat baik internal pemerintah maupun masyarakat</p> <p>d Pembaharuan sistem pelayanan publik berbasis e-Gov (cyber province)</p> <p>e Pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui cyber dan iptek</p> <p>a Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan</p> <p>b Pengembangan SDM birokrasi yang berkompeten, berintegritas dan profesional</p> <p>a Pengawasan internal, eksternal, dan fungsional dalam upaya pembinaan dan pencegahan tindak pidana korupsi</p> <p>b Pembentukan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih</p> <p>c Penguatan kelembagaan desa dalam mengantisipasi penyerahan urusan pembangunan dan pemerintahan</p>
<p>3 Memperkuat kapasitas manajemen birokrasi</p>	<p>3.1 Meningkatkan kinerja pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata</p>	<p>3.1.1 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dalam perencanaan pembangunan</p>	<p>a Sinkronisasi, koordinasi, integrasi dan sinergi perencanaan dan implementasi pembangunan yang multi sektor dan multi ruang;</p> <p>b Pembenahan pelayanan publik yang diarahkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan peningkatan kualitas aparatur pemerintahan yang profesional</p> <p>c Membangun basis data daerah yang terpadu dan valid untuk kepentingan perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan, dan informasi pembangunan</p> <p>d Mewujudkan kompilasi dokumen dan arsip daerah dalam sistem informasi yang terintegrasi.</p> <p>e Penatalaksanaan dokumen, arsip, dan aset daerah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
4 Merealisasikan pembangunan politik	4.1 Meningkatkan kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan, dalam kerangka supremasi hukum.	4.1.1 Penanaman nilai-nilai demokrasi yang berkeadilan (anti kekerasan, nilai-nilai toleransi politik)  4.1.2 Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan kearifan lokal yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supremasi hukum	f Penatalaksanaan manajemen kependudukan dan demografi berbasis teknologi informasi g Penguatan partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan  a Mengembangkan kehidupan demokrasi yang bermartabat melalui pendekatan kultural dan pembangunan yang berkeadilan  a Meningkatkan pendidikan politik masyarakat b Memperkuat lembaga demokrasi lokal c Meningkatkan pembinaan lembaga politik lokal d Memantapkan pembinaan kepada masyarakat dan kelompok sosial e Memperkuat peran perempuan dalam kehidupan politik f Memperkuat peran Perguruan Tinggi dalam mendorong proses demokrasi

## 6.2. Kewilayahan Perencanaan Pembangunan

Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di Provinsi Lampung selama ini masih belum dapat mengatasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, baik antar kabupaten dan kota maupun antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Guna menjamin keseimbangan pembangunan daerah antarwilayah di Provinsi Lampung maka perlu disusun suatu kebijakan pembangunan kewilayahan.

Fokus pembangunan daerah pada tahun 2015-2019 akan diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan dan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya dengan sasaran wilayah-wilayah tertinggal dan kota pusat pertumbuhan.

Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan dan sistem perkotaan pada RPJM Daerah Provinsi Lampung 2015-2019 ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010

Tabel 6.2. Kebijakan Kewilayahan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

HIRARKI	KOTA	FUNGSI UTAMA
PKN	Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat pemerintahan provinsi</li> <li>• pusat perdagangan dan jasa regional;</li> <li>• pusat distribusi dan koleksi;</li> <li>• pusat pendukung jasa pariwisata;</li> <li>• pusat pendidikan tinggi.</li> </ul>
PKW	Metro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat pemerintahan kota;</li> <li>• pusat perdagangan dan jasa;</li> <li>• pusat pendidikan khusus</li> </ul>
	Kota Bumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat pemerintahan kabupaten;</li> <li>• pusat perdagangan dan jasa</li> </ul>
	Kalianda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat pemerintahan kabupaten;</li> <li>• pusat jasa pendukung pariwisata;</li> <li>• pusat perdagangan dan jasa</li> </ul>
	Liwa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat pemerintahan kabupaten;</li> <li>• pusat perdagangan dan jasa.</li> <li>• daerah konservasi</li> </ul>

<b>HIRARKI</b>	<b>KOTA</b>	<b>FUNGSI UTAMA</b>
	<b>Menggala</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat pemerintahan kabupaten;</li> <li>• perdagangan dan jasa;</li> <li>• pusat koleksi dan distribusi;</li> <li>• pusat kegiatan usaha dan produksi</li> </ul>
	<b>Kota Agung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat pemerintahan kabupaten;</li> <li>• pusat perdagangan dan jasa;</li> <li>• pusat perikanan;</li> <li>• pusat industri</li> </ul>
<b>PKWp</b>	<b>Sukadana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat pemerintahan kabupaten;</li> <li>• pusat perdagangan dan jasa</li> </ul>
	<b>Blambangan Umpu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat pemerintahan kabupaten;</li> <li>• pusat perdagangan;</li> <li>• pertanian</li> </ul>
	<b>Pringsewu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat pemerintahan kabupaten;</li> <li>• pusat perdagangan</li> </ul>
	<b>Gedong Tataan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat pemerintahan kabupaten;</li> <li>• b. pusat perdagangan dan jasa</li> </ul>
	<b>Bakauheni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat koleksi dan distribusi;</li> <li>• pariwisata</li> </ul>
	<b>Terbanggi Besar- Bandar Jaya-Gunung Sugih (Terbagus)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat pemerintahan kabupaten;</li> <li>• pusat pendidikan unggulan terpadu;</li> <li>• perdagangan dan jasa;</li> <li>• pusat koleksi dan distribusi</li> </ul>
	<b>Mesuji</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat pemerintahan kabupaten;</li> <li>• perikanan dan industrinya;</li> <li>• perdagangan dan jasa;</li> <li>• perkebunan;</li> </ul>
	<b>Panaragan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat pemerintahan kabupaten;</li> <li>• perdagangan dan jasa.</li> </ul>
<b>PKL</b>	<b>Tanjung Bintang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat industri;</li> <li>• pusat perdagangan dan jasa;</li> <li>• koleksi pertanian dan perkebunan</li> </ul>
	<b>Sidomulyo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pertanian;</li> <li>• perdagangan dan jasa</li> </ul>
	<b>Unit II Banjar Agung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat perdagangan dan jasa;</li> <li>• pusat koleksi dan distribusi pertanian dan perkebunan</li> </ul>
	<b>Seputih Banyak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat pengolahan hasil pertanian</li> </ul>

HIRARKI	KOTA	FUNGSI UTAMA
	<b>Kalirejo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian;</li> <li>• pusat pengembangan industri kecil dan menengah;</li> <li>• pusat pengembangan produksi perikanan air tawar</li> </ul>
	<b>Way Jepara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian;</li> <li>• pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian hortikultura</li> </ul>
	<b>Fajar Bulan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian;</li> <li>• pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian hortikultura</li> </ul>
	<b>Labuhan Maringgai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat perikanan;</li> <li>• pusat perdagangan dan jasa;</li> <li>• pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian</li> </ul>
	<b>Krui</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat perikanan laut;</li> <li>• pusat pertanian lahan kering dan basah;</li> <li>• pusat perdagangan dan jasa;</li> <li>• pusat pariwisata</li> </ul>
	<b>Bukit Kemuning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• perdagangan;</li> <li>• pengolahan hasil pertanian</li> </ul>
	<b>Wiralaga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• industri;</li> <li>• perikanan;</li> <li>• perkebunan</li> </ul>
	<b>Wonosobo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan perikanan laut.</li> </ul>
<b>KPPN</b>	<b>Sukau Tanggamus, Pesisir Barat Lampung Selatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPPN Danau Ranau</li> <li>• KPPN Bukit Barisan</li> <li>• KPPN Krakatau Selat Sunda</li> </ul>
<b>DPN</b>	<b>Lampung Selatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DPN Krakatau Ujung Kulon</li> </ul>